



PERAN PEMERINTAH MENSTABILKAN INFLASI DENGAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Novita Ramadhani, Anggy Sthela Oktaviany, Muhammad Arkaan Satria Utama

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: novita.ramadhani22@mhs.uinjkt.ac.id, anggy.sthela22@mhs.uinjkt.ac.id,
arkaan.satria22@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang: Menstabilkan inflasi dengan ini kebijakan moneter dalam persepektif islam memiliki berbagai pendapat dan tindakan yang dilakukan peran pemerintah.

Kata kunci:

Kebijakan
Moneter, Inflasi
dalam Persepektif
Ekonomi Islam

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis peran pemerintah terhadap inflasi dengan kebijakan moneter dalam pandangan islam dan konvensional.

Metode: Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif bersifat deskriptif, dan menggunakan data skunder yang bersumber dari jurnal, artikel, dan berbagai buku-buku terkait inflasi dengan kebijakakn moneter dalam persepektif islam.

Hasil: Inflasi merupakan faktor terbesar makro yang sering dilibatkan terhadap perekonomian. Sehingga sangat mengakibatkan tingkat pengangguran, kesulitan mendapatkan kerja, dan juga naiknya inflasi. Pencapaian inflasi ini sangat rendah, hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian. Dengan adanya peran pemerintah yang menggunakan kebijakan moneter, hal ini sangat penting bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian tetap berada pada titik keseimbangan. Dimana variabel kebijakan moneter (jumlah uang beredar, dan suku bunga), dan stabilitas ekonomi (inflasi, kurs, dan produk domestik bruto). Stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan tingkat inflasi, merupakan tujuan utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kesimpulan: Dalam konteks ini, kebijakan moneter harus mendorong investasi yang produktif, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan bahwa distribusi kekayaan dan keuntungan bersifat adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya stabilisasi ekonomi tidak hanya mencapai tujuan praktis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam perspektif ekonomi Islam.

ABSTRACT

Background: *Stabilizing inflation with this monetary policy in an Islamic perspective has various opinions and actions carried out by the role of the government.*

Purpose: *This study aims to evaluate and analyze the role of the government on inflation with monetary policy in Islamic and conventional views.*

Method: *This type of research is a descriptive quantitative method, and uses skunder data sourced from journals, articles, and various books related to inflation with monetary policy in an Islamic perspective.*

Keywords:
Monetary Policy,
Inflation in Islamic
Economic
Perspective

Results: *Inflation is the biggest macro factor that is often involved in the economy. So that greatly results in the unemployment rate, difficulty finding work, and also rising inflation. The achievement of this inflation is very low, this will have a positive impact on the economy. With the role of the government that uses monetary policy, this is very important to be useful in maintaining and improving the economy remains at a point of balance. Where monetary policy variables (money supply, and interest rates), and economic stability (inflation, exchange rates, and gross domestic product). Economic stability, especially in controlling the inflation rate, is the main objective of the government to achieve sustainable economic growth.*

Conclusion: *In this context, monetary policy should encourage productive investment, avoid excessive speculation, and ensure that the distribution of wealth and profits is fair and sustainable. Thus, economic stabilization efforts not only achieve practical goals but are also aligned with moral and ethical values upheld in the perspective of Islamic economics.*

PENDAHULUAN

Dengan turunnya nilai mata uang dan adanya krisis ekonomi, hal ini terjadi pada tingkat internasional dan pada Indonesia, telah menjadi peristiwa yang sering terulang sepanjang sejarah (Nezky, 2013). Dimulai dari krisis besar seperti The Great Depression pada tahun 1930-an, dilanjutkan dengan krisis Amerika Latin pada tahun 1980-an, semua ini menciptakan pengalaman ekonomi global. Peningkatan inflasi (hiperinflasi) dalam konteks ini secara signifikan mempengaruhi kerusakan dalam struktur ekonomi (Wicaksana & Sukmana, 2018)

Krisis ini bermula dari masalah di sektor moneter, yaitu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan mengakibatkan dampak yang menyebar ke seluruh sektor ekonomi tanpa terkecuali (Arianto, 2020). Inflasi mencapai tingkat 77,60%, yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar 13,20%. Sebagian besar sektor ekonomi mengalami kontraksi signifikan, terutama konstruksi dengan penurunan 36,4%, yang kemudian diikuti oleh sektor keuangan dengan 26,6% (Firdaus, Listiyanto, Talattov, & Taufikurahman, 2020).

Dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dan otoritas moneter mengimplementasikan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, serta melibatkan sektor rill (Harahap, Lubis, & Zein, 2020).. Dari segi kebijakan moneter, Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga dan mengetatkan likuiditas perbankan, mengevaluasi efektivitas instrumen moneter, dan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter (Warjiyo, 2017). Namun, dalam konteks ini, otoritas moneter hanya menyentuh aspek teknis atau gejala, dan gabungan kebijakan yang digunakan malah memperparah krisis.

Ibu Taimiyah pada era Daulah Bani Mamluk telah memperingatkan tentang kualitas buruk mata uang, menyatakan bahwa mata uang berkualitas rendah dapat menggantikan mata uang berkualitas baik dari peredaran (Gunawan, Uyuni, & Fauzi, 2022). Inflasi dapat

disebabkan oleh faktor non-moneter seperti bencana alam atau lambatnya respon pemerintah terhadap inflasi.

Dalam mengatasi masalah ini, keseharian manusia, termasuk dalam penurunan nilai mata uang dan krisis moneter, haruslah berdasarkan kepada norma-norma agama, khususnya islam, yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi (Afifah & Setiawan, 2012).

Inflasi merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk pada Indonesia (Yanti & Soebagyo, 2022). Saat ini, Indonesia menghadapi inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok seperti garam, gula, minyak, kopi, dan beras. Pemerintah juga sering mempertimbangkan kenaikan pada harga rokok menjadi Rp. 50.000 per bungkus, yang dapat berdampak pada pola konsumsi masyarakat dan perusahaan-perusahaan rokok yang memungkinkan melakukan PHK untuk memperkecil biaya produksi.

Tentu, hal ini menghasilkan peningkatan tingkat pengangguran. Rasa takut akan kehilangan pekerjaan tentu menghantui para pekerja yang bekerja di perusahaan rokok ini. Dampak lebih lanjut dari pengangguran mencakup peningkatan tingkat kriminalitas, karena pendapatan menurun sementara kebutuhan meningkat. Sebagai akibatnya, tindak kejahatan-kejahatan seperti pencurian, copet, begal dan perampokan meningkat. Fenomena ini berbeda dengan masa Rasulullah SAW, di mana konsep ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi Islam. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengeksplorasi konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional serta mencari solusi untuk mengatasi inflasi dalam kedua konteks tersebut.

Kebijakan moneter bertujuan menetapkan dan mencapai target inflasi terhadap jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah, serta berkomitmen pada stabilitas harga sebagai tujuan utama dalam jangka waktu Panjang (Kemu & Ika, 2016).

Inflasi ini menjadi perhatian utama sebab dapat memiliki dampak luas pada perekonomian. Tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat memperburuk distribusi pendapatan, meningkatkan tingkat kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menciptakan defisit neraca perdagangan, meningkatkan besaran utang luar negeri, dan menimbulkan tidak stabilan politik. Oleh karena itu, Bank Sentral memprioritaskan pengendalian inflasi dalam melakukan kebijakan moneternya, dengan ini Bank Indonesia merancang kerangka kebijakan moneter yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Bank Indonesia khususnya memfokuskan upaya pada pengendalian inflasi, sejalan dengan perkembangan teori ekonomi dan temuan empiris di beberapa negara yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka waktu panjang dapat memengaruhi tingkat inflasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang biasa semantik yang terkait dengan konsep inflasi dengan kebijakan moneter dalam persepektif ekonomi Islam dengan menggambar pada berbagai sumber ilmiah, termasuk buku, jurnal dan makalah yang secara khusus mengeksplorasi gagasan inflasi dengan kebijakan moneter ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif, mengandalkan data sekunder dari beberapa jurnal, artikel, dan berbagai buku terkait mengenai inflasi dengan kebijakan moneter dalam konteks Islam (Yuliani, 2018). Penulis menerapkan teknik analisis dengan menggunakan metode library research, di mana pengumpulan data pustaka dan dokumen tertulis dilakukan untuk memahami serta memberikan keterangan mengenai isu yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Subsequently, penulis mencatat, menafsirkan, dan mengaitkannya dengan argumen ilmiah untuk menghasilkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Aulia Pohan (2018), kebijakan moneter merupakan suatu usaha pengaturan dalam ranah moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang dan merangsang kelancaran produksi dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahendra, 2019). Secara sejalan dengan hal tersebut, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan, kebijakan moneter didefinisikan sebagai serangkaian rencana dan tindakan yang diambil oleh otoritas moneter secara terkoordinasi guna menjaga keseimbangan moneter, stabilitas nilai uang, kelancaran produksi, dan mempromosikan pembangunan, serta memperluas peluang pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia (BI) di Indonesia, memiliki peran utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah, yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Berbagai mekanisme, seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral, digunakan dalam operasionalisasi kebijakan moneter. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang dan jalur transmisi moneter terhadap suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan faktor-faktor lainnya.

Dalam konteks ekonomi islam, pemerintah perlu memainkan peran penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil, pembangunan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan standar kehidupan. Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif menjadi instrumental yang digunakan supaya dapat mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan menjaga stabilitas harga (Latifah, 2015). Terdapat tiga cara yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib.

Pentingnya pemerintah dalam mengatur ekonomi juga mencerminkan dalam kebijakan moneter yang mengatasi inflasi. Berbagai faktor, seperti korupsi, pajak yang tinggi, dan pencetakan uang berlebihan, dapat menyebabkan inflasi. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang tepat, baik kebijakan fiskal maupun moneter., hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tentangan inflasi. Dalam ekonomi islam, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai islam untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Alwaris & Hasan, 2023).

Uang memainkan peran penting dalam perekonomian islam. Ketika tidak ada uang, banyak masalah sosial akan muncul dan kelebihan uang yang tidak terkendali atau tidak sebanding dengan barang juga akan menjadi masalah ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan negara harus mengutamakan kestabilan uang. Pasar terbuka dikritik oleh ekonom islam karena instrumen moneter konvensional hanya berfokus pada tingkat diskonto. Apakah instrumen tersebut dapat digunakan sebagai alat keuangan islam? Secara khusus, mereka menentang penerapan tingkat diskonto, yang masih menggunakan bunga atas pinjaman yang disediakan Bank Sentral.

Dalam teori, kebijakan moneter adalah komponen integral dari kebijakan ekonomi makro, yang melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Manfaat kebijakan moneter ini melibatkan berbagai aspek, seperti menjaga kondisi investasi yang baik, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki neraca pembayaran, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, stabilitas harga barang, dan mengendalikan tingkat inflasi.

Evaluasi stabilitas ekonomi makro bergantung pada dampak dorongan kebijakan harga pangan atau variabel makro lainnya terhadap indikator kunci ekonomi. Keberhasilan kebijakan moneter diukur melalui tiga indikator utama:

1. Uang Beredar Kebijakan Moneter: Pengelolaan jumlah uang beredar untuk mengendalikan potensi inflasi.
2. Pengendalian Nilai Tukar: Mengelola pergerakan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain untuk mengontrol inflasi.
3. Target Inflasi: Menetapkan dan mencapai target inflasi sebagai tujuan utama/jangka panjang, mengingat dampak luas inflasi terhadap perekonomian makro.

Inflasi menjadi sorotan karena dampaknya yang signifikan, seperti menurunnya distribusi pendapatan, peningkatan kemiskinan, penurunan tabungan domestik, defisit neraca perdagangan, dan ketidakstabilan politik. Bank Sentral menetapkan pengendalian inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneternya, dengan panduan dari kerangka kebijakan moneter yang di samakan dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Fokus BI pada pengendalian inflasi juga di dorong oleh perkembangan teori ekonomi dan temuan empiris.

Dalam ekonomi islam, penerapan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral tidak mungkin karena tidak ada sistem bunga dalam ekonomi tersebut. Untuk mengendalikan kebijakan moneter pada konteks ekonomi islam, Bank Sentral memerlukan instrumen yang tidak melibatkan bunga. Meskipun demikian, sejumlah pakar ekonomi islam berpendapat bahwa beberapa instrumen kebijakan moneter konvensional masih bisa digunakan, seperti *reserve requirement*, *overall and selecting kredit ceiling*, *moral susional*, dan *change in monetary*.

Definisi inflasi dalam *Dictionary of Economics* menyatakan bahwa itu adalah meningkatnya tingkat harga yang umum dalam suatu perekonomian dari masa ke masa. Bank Indonesia, sementara itu, menjelaskan inflasi sebagai *trend* harga-harga yang terus meningkat secara umum. Namun, ada kontroversi, seperti yang diutarakan oleh Mazhab ekonomi Austria yang mengecam definisi tersebut.

Penyebab utama inflasi melibatkan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap barang, kenaikan biaya produksi seperti bahan bakar dan upah pekerja, serta jumlah uang yang tinggi di masyarakat. Inflasi juga bisa bersifat alami, disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam.

Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi tiga *Natural Inflation*, *Human Error Inflation* dan *Expected Inflation*. *Natural Inflation* terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya, akibat bencana alam. *Human Error Inflation*, di sisi lain, disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti korupsi, pajak tinggi, atau pencetakan uang berlebih. *Expected Inflation*, inflasi yang Diharapkan mengakibatkan peningkatan permintaan dan penambahan jumlah uang yang beredar. Apabila individu meyakini bahwa inflasi akan tinggi pada tahun ini, mereka akan menghabiskan uang mereka untuk membeli dan menyimpan berbagai barang, terutama properti dan emas, sebagai upaya untuk mencegah inflasi. Dengan demikian, terjadilah inflasi. Faktor lain yang dapat memicu inflasi adalah perilaku egois masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup melebihi kemampuan finansial mereka. Masyarakat menggunakan kartu kredit untuk berbelanja karena terbatasnya uang

yang dimiliki. Penggunaan kartu kredit ini berarti berbelanja dengan uang yang diharapkan akan Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi tiga *Natural Inflation*, *Human Error Inflation* dan *Expected Inflation*. *Natural Inflation* terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya, akibat bencana alam. *Human Error Inflation*, di sisi lain, disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti korupsi, pajak tinggi, atau pencetakan uang berlebih. *Expected Inflation*, inflasi yang Diharapkan mengakibatkan peningkatan permintaan dan penambahan jumlah uang yang beredar. Apabila individu meyakini bahwa inflasi akan tinggi pada tahun ini, mereka akan menghabiskan uang mereka untuk membeli dan menyimpan berbagai barang, terutama properti dan emas, sebagai upaya untuk mencegah inflasi. Dengan demikian, terjadilah inflasi. Faktor lain yang dapat memicu inflasi adalah perilaku egois masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup melebihi kemampuan finansial mereka. Masyarakat menggunakan kartu kredit untuk berbelanja karena terbatasnya uang yang dimiliki. Penggunaan kartu kredit ini berarti berbelanja dengan uang yang diharapkan akan diterima di masa depan. Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah uang yang beredar melebihi pemasukan penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi.

Kebijakan Moneter

Peran pemerintah memiliki signifikansi besar dalam perekonomian, terutama dalam upaya menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Melibatkan diri dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terjadinya pengurangan kemiskinan, perkembangan ekonomi berkelanjutan, mencapai kesejahteraan ekonomi, dan menaikkan standar kehidupan. Pemerintah wajib membenarkan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kecil yang kaya. Tanggung jawab pemerintah melibatkan penerapan aspek-aspek Islam dalam berbagai aspek kehidupan, serta dalam ranah perekonomian, melalui kebijakan positif dan tindakan ketat. Dalam sektor ekonomi, pemerintah perlu memastikan bahwa semua warga memiliki kebutuhan dasar terpenuhi, menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan akses ke sumber daya ekonomi, dan menegakkan nilai-nilai Islam ketika menetapkan harga serta melakukan pembayaran transfer untuk memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

Semua aspek di atas memerlukan penerapan kebijakan ekonomi yang cermat oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter muncul sebagai dua kebijakan utama di bidang ekonomi. Penggunaan bank sentral sebagai alat pengaruh terhadap pemasukan, kesempatan kerja, dan tingkat harga dikenal sebagai kebijakan moneter. Dalam buku "Teori Ekonomi Makro," Prathama Rahardja dan Mandala Manurung menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengendalikan perekonomian makro agar sama dengan kondisi yang di harapkan dengan mengubah jumlah nilai mata uang yang beredar (Pratama, 2010). Reksoprayitno, (2000) menyatakan bahwa segala repon pemerintah bertujuan agar memengaruhi perekonomian melalui menambahnya atau mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dikenal sebagai kebijakan moneter.

Jadi, kebijakan moneter merupakan bagian dari langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jumlah nilai tukar uang yang beredar, baik dengan menambah atau mengurangkannya, sekaligus membantu menjaga stabilitas perekonomian. Selain memperbaiki sektor riil, sangat penting untuk menghilangkan kesalahpahaman mengenai masalah uang. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain sebenarnya disebabkan oleh dua penyebab utama yang berkaitan dengan masalah uang (Lamia Karim, 2008). Menambah atau mengurangi jumlah nilai tukar uang yang beredar merupakan salah satu cara untuk mengatur jumlah uang dalam masyarakat. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Adalah langkah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah nilai tukar uang beredar, agar memastikan kelancaran siklus perekonomian. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dengan risiko kenaikan inflasi, sambil memperkuat daya beli dan permintaan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di sebuah negara.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Adalah upaya kebijakan yang bertujuan menurunkan tingkat inflasi negara. Fokus kebijakan ini adalah mengurangi jumlah nilai tukar uang yang beredar di perekonomian. Bank sentral menciptakan kebijakan ini agar dapat menjaga stabilitas jumlah uang di masyarakat. Sasaran utama bagian dari mengurangi jumlah nilai tukar uang beredar dan membuat pemberian kredit lebih sulit. Menurut Karim, (2007) bank sentral dapat mengatasi inflasi melalui empat cara, yaitu:

a. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Mengatur jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SPBU (Surat Berharga Pasar Uang).

b. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Memberikan fasilitas kredit atau simpanan kepada bank dengan tingkat diskonto sesuai kebijakan moneter. Tingkat diskonto yang tinggi atau rendah mempengaruhi permintaan kredit bank.

c. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengatur cadangan yang wajib di amankan di bank oleh pemerintah. Terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder.

d. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Mengontrol jumlah uang beredar dengan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya adalah meminta bank untuk berhati-hati dalam memberikan kredit.

Uang memegang peran sentral dalam ekonomi Islam, dan stabilitas uang harus diutamakan. Meskipun pasar terbuka dikritik dalam konteks ekonomi Islam, terutama terkait tingkat diskonto yang masih melibatkan bunga, instrumen ini menjadi fokus perdebatan apakah bisa disesuaikan sebagai alat keuangan Islam.

Mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan hukum islam, menurut yang sesuai dengan hukum islam, menurut Chapra (2000, halaman. 173-182), harus mencakup enam komponen;

1. Target Perkembangan M dan Mo

Bank Sentral perlu menghitung perkembangan peredaran uang (M) setiap tahun sama dengan tujuan ekonomi nasional. Perkembangan M ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan Uang (*High Powered Money*), yang merujuk pada uang yang didistribusikan dan didepositkan di Bank Sentral. Bank Sentral perlu memantau dengan teliti peningkatan modal yang diberikan kepada pemerintah, Bank Komersial, dan lembaga keuangan sama dengan proporsi yang telah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran dalam perekonomian islam. Dana mudharabah dapat dijadikan oleh Bank Sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengatur kredit.

2. Saham Publik terhadap Deposito Atas Untuk Uang Giral (*Public Share of Demand Deposit*)

Fungsi alat ini mirip dengan pasar terbuka, di mana Bank Sentral mempengaruhi Bank Komersial secara langsung melalui transfer persyaratan simpanan pemerintahan atau dari Bank-Bank Komersial

3. *Statutory Reserve Requirement*

Alat ini memiliki relevansi dalam ekonomi Islam karena tidak melibatkan tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka. Bank Komersial diwajibkan untuk memiliki cadangan wajib di Bank Sentral sebagai jaminan atas deposit dan untuk mendukung likuiditas bank. Sebagai gantinya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikenakan kepada Bank Komersial untuk mobilisasi dana. Dana yang diterima oleh Bank Sentral melalui statutory reserve requirement memiliki dua tujuan, salah satunya adalah sebagai cadangan terakhir bagi penerima pinjaman. Meskipun Bank Komersial Islam beroperasi dengan sumber keuangan berbasis kerjasama bagi hasil yang sulit diprediksi, terdapat situasi di mana mereka memerlukan bantuan dari Bank Sentral. Oleh karena itu, Bank Sentral dapat meningkatkan cadangan melalui pool cadangan yang melibatkan sejumlah bank.

4. Pembatasan Kredit

Penetapan batas skor kredit maksimum oleh Bank Komersial bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta total kredit sesuai dengan target moneter. Bergabung hanya pada persyaratan cadangan memberikan kemudahan pada Bank Sentral untuk mengatur uang berenergi tinggi, namun tidak menjamin sukses dalam manajemen mata uang. Hal ini karena ekspansi kredit dapat melebihi target yang ditetapkan. Keadaan ini timbul karena aliran dana ke sistem perbankan diperkirakan berasal dari pertukaran antara Bank Sentral dan Bank Umum, sementara sulit menentukan aliran dana dari sumber lain yang akurat. Tidak jelas antara hubungan rasio cadangan Bank Umum dan ekspansi kredit juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Secara singkat, perilaku jumlah uang beredar mencerminkan interaksi kompleks dari berbagai faktor internal dan eksternal, sehingga penetapan batas kredit menjadi langkah terbaik.

5. Alokasi Kredit yang Berorientasi Tujuan

Pemanfaatan distribusi pembiayaan bank menjadi sarana yang optimal bagi semua pelaku usaha yang bertujuan untuk agar menghasilkan sebuah barang dan jasa yang dipergunakan serta didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, pelaksanaan ini menjadi kompleks karena mayoritas dana yang terkumpul melalui bisnis perbankan umum berasal dari penabung kecil, tetapi lebih difokuskan kepada pemberian pinjaman kepada pengusaha termuka. Keengganan industri perbankan memberikan kredit kepada usaha kecil muncul karena meningkatkan risiko pengeluaran pembiayaan untuk usaha kecil. Dampaknya adalah sulitnya usaha kecil mendapatkan pembiayaan dari perbankan., meskipun bank bersedia menyediakan dana dengan syarat-syarat yang sulit, terutama terkait persyaratan agunan. Dalam situasi ini, kelangsungan hidup usaha kecil diperkirakan terancam, meskipun sebenarnya usaha kecil memiliki potensi untuk meningkatkan produksi, memperluas peluang kerja, dan mendukung distribusi pendapatan.

6. Teknik Lain

Teknik kualitatif dan kuantitatif yang telah dijelaskan perlu ditambahkan dengan alat-alat lain guna mencapai tujuan, serta masuk kedalamnya himbuan moral. Berdasarkan bibliografi perbankan Islam, terdapat substitusi instrumen kebijakan yang digunakan oleh Bank Sentral, sebagaimana diuraikan oleh Machmud dan Rukmana pada halaman 48.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter, bertujuan agar dapat meningkatkan kemakmuran penduduk masyarakat yang dipimpin oleh otoritas moneter, terutama Bank Sentral, bertujuan utama menjaga stabilitas nilai tukar uang, memperlancar produksi, dan mendukung pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Sentral, contohnya Bank Indonesia, memiliki peran krusial dalam menerapkan kebijakan moneter guna mencapai stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter menggunakan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan moral suasion. Tujuannya adalah mencapai perubahan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang adil, serta keseimbangan neraca pembayaran.

Dalam konteks ekonomi Islam, diperlukan instrumen kebijakan moneter sesuai prinsip syariah, tanpa melibatkan bunga (riba) dalam transaksi. Beberapa instrumen konvensional masih dapat digunakan, seperti reserve requirement, plafon kredit, dan distribusi pembiayaan berorientasi tujuan.

Pentingnya kebijakan moneter juga tercermin dalam pengendalian inflasi, yang mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Pengendalian inflasi dilaksanakan dengan mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan nilai tukar mata uang, serta menetapkan target inflasi dalam jangka pendek dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Rifda Zahra, & Setiawan, Achma Hendra. (2012). Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM Di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Alwaris, Sri Ayu Andari Putri, & Hasan, Nugraha. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 65–77.
- Arianto, Bambang. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106–126.
- Firdaus, Ahmad Heri, Listiyanto, Eko, Talattov, Abra P. G., & Taufikurrahman, M. Rizal. (2020). Kajian tengah tahun INDEF 2020: Menata arsitektur ekonomi pasca pandemi. INDEF.
- Gunawan, Agus, Uyuni, Yuyun Rohmatul, & Fauzi, Muhamad. (2022). Improving Education Quality Through Madrasa Committee Management in Indonesia. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 2(1), 1–17.
- Harahap, Yuli Rahmadani, Lubis, Delima Sari, & Zein, Aliman Syahuri. (2020). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 76–87.
- Karim, Adiwarmen A. (2007). *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*.
- Karim, Lamia. (2008). Demystifying micro-credit: the Grameen Bank, NGOs, and neoliberalism in Bangladesh. *Cultural Dynamics*, 20(1), 5–29.
- Kemu, Suparman Zen, & Ika, Syahrir. (2016). Transmisi BI Rate sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 261–284.
- Latifah, Nur Aini. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124–134.
- Mahendra, Opi Chanty. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nezky, Mita. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan

- perdagangan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(3), 89–103.
- Pratama, Billy Arma. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Reksoprayitno, Soediyono. (2000). *Ekonomi Makro: analisis IS-LM dan permintaan-penawaran agregatif*.
- Warjiyo, Perry. (2017). *Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Vol. 11)*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Wicaksana, Achmad Adnan Fauzi, & Sukmana, Raditya. (2018). Inflasi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015: Analisis Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pasar Uang Antar Bank, Pasar Uang Antar Bank Syariah, Finance To Deposit Ratio Dan Loan To Deposit Ratio. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(12).
- Yanti, Yuliana Wahyu Tri Fidia, & Soebagyo, Daryono. (2022). Analisis Pengaruh Jub, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 249–264.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).